

EARNINGS MANAGEMENT: VIEWED FROM DEFERRED TAX ASSETS, DEFERRED TAX EXPENSES, AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

Aditya Restu Prabawa¹, Dewa Gede Agung Trimartana Krisna Wibawa², Amrie Firmansyah³

^{1,2, &3}Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: amrie.firmansyah@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effect of deferred tax assets, deferred tax expense, and corporate social responsibility on earnings management. This research's population is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2019 period. Based on purposive sampling, the total sample employed in this study amounted to 56 observations. This study's secondary data were sourced from the www.idx.co.id and its official website. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression with panel data. This study concludes that deferred tax assets and deferred tax expenses align with the company's earnings management activities. Meanwhile, corporate social responsibility can reduce the opportunistic actions of managers through earnings management activities.

Keywords: Earnings Quality; Deferred Tax; Social Responsibility

MANAJEMEN LABA: SUDUT PANDANG ASET PAJAK TANGGUHAN, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan tanggung jawab perusahaan terhadap manajemen laba. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019 menjadi populasi penelitian ini. Berdasarkan *purposive sampling* yang telah dilakukan, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 56 observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda data panel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan sejalan dengan aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan dapat menurunkan tindakan oportunistik manajer melalui aktivitas manajemen laba.

Kata Kunci: Kualitas Laba; Pajak Tangguhan; Tangung Jawab Sosial

PENDAHULUAN

Awal 2019 Indonesia dihebohkan dengan kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa ditahun 2018 PT Garuda Indonesia Tbk berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$809 ribu, hal tersebut berbanding terbalik dengan laporan keuangan tahun 2017 dimana PT Garuda Indonesia membukukan rugi sebesar US\$216,8 juta (www.cnnindonesia.com). Hasil penyelidikan menemukan bahwa perusahaan mengakui piutang PT Mahata sebesar US\$ 238,94 juta sebagai pendapatan. Hal tersebut menyebabkan laporan keuangan yang harusnya rugi menjadi untung (Nasution, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik manajemen laba masih dilakukan oleh perusahaan besar dan listed di Bursa Efek Indonesia. Manajemen laba yang dilakukan baik yang bersifat konservatif ataupun ekstrim dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan (*users*) karena informasi yang disajikan tidak menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Anasta, 2015).

Perusahaan memiliki sebuah tujuan utama yaitu memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Para manajer diberikan kepercayaan oleh pemegang saham untuk mengontrol proses bisnis dari perusahaan. Para pemegang saham menginginkan pihak manajemen untuk menghasilkan pendapatan tinggi dan memperkecil biaya agar deviden yang dibagikan maksimal. Pihak manajemen akan berusaha untuk mempertahankan jabatannya pada perusahaan tersebut dengan cara memenuhi keinginan pemegang saham. Manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang, namun disisi lain manajemen juga berusaha untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan perpajakan (Fitriany, 2016).

Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait (Kurnia, 2018). Manajemen laba terjadi ketika manajer memutuskan untuk mengubah laporan keuangan untuk memperdaya pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada angka yang dilaporkan pada laporan keuangan (Healy & Wahlen, 1999). Dalam melakukan tugasnya, manajemen perlu melakukan estimasi dalam beberapa kejadian ekonomi, seperti umur aset dan nilai sisanya. Dalam melakukan estimasi, manajemen harus memastikan bahwa nilai yang mereka berikan wajar dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan. Motivasi dan peluang yang dimiliki oleh manajer, membuat manajer melakukan praktik manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. Namun dalam melakukan praktik manajemen laba, manajer harus melakukan dengan cermat agar tidak mudah diketahui oleh pihak lain. Prasetyo et al. (2019) menerangkan tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan.

Penelitian terdahulu yang meneliti manajemen laba perusahaan di Indonesia sebagian besar menggunakan ukuran perusahaan (Arifin & Destriana, 2016; Lidiawati & Asyik, 2016; Mahawyahrti & Budiasih, 2016; Medyawati & Dayanti, 2016; Gayatri & Pria, 2016; Purnama, 2017), *corporate governance* (Agustia, 2013; Arifin & Destriana, 2016; Asward & Lina, 2015; Larastono et al., 2016; Lestari & Murtanto, 2017; Lidiawati & Asyik, 2016; Oktaviani et al., 2015), kualitas audit (Lidiawati & Asyik, 2016; Aryanti et al., 2017; Lestari & Murtanto, 2017), *leverage* (Agustia, 2013; Mahawyahrti & Budiasih, 2016; Utari & Sari, 2016), profitabilitas (Purnama, 2017), asimetri informasi (Mahawyahrti & Budiasih, 2016; Utari & Sari, 2016), kepemilikan (Lidiawati & Asyik, 2016; Utari & Sari, 2016; Purnama, 2017; Lestari & Murtanto, 2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, masih sedikit penelitian yang mengulas tentang aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan CSR terhadap manajemen laba perusahaan sehingga pengujian ketiga komponen tersebut terhadap manajemen laba penting untuk dilakukan.

Manajemen laba dapat terdeteksi dengan adanya perbedaan laba antara akuntansi dan fiskal yang dapat dilakukan dengan menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih (kewajiban pajak tangguhan dikurangi aset pajak tangguhan) yang mengakibatkan peningkatan beban pajak tangguhan (Djamaluddin et al, 2008). Pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia merupakan strategi untuk melindungi perilaku menyimpang dari manajemen agar reputasi dan legitimasi perusahaan terjaga (Pratiwi & Siregar: 2019). Perusahaan yang melakukan CSR dalam kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya sesuai dengan yang perusahaan inginkan pada periode tersebut dan ada indikasi bahwa mereka akan mengatur laba yang mereka laporkan pada laporan keuangan.

Aset pajak tangguhan merupakan aset yang terjadi apabila perbedaan waktu mengakibatkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak sebagaimana aturan perpajakan (Waluyo, 2017). Aset pajak tangguhan diakibatkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan adanya sisa kompensasi kerugian (Anasta, 2015). Perusahaan harus menurunkan nilai tercatat aset pajak tangguhan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan tersebut. Penurunan ini harus disesuaikan kembali apabila terdapat laba fiskal yang kemungkinan besar memadai. Dengan adanya kewajiban untuk melakukan peninjauan kembali pada tanggal neraca, maka setiap tahun manajemen harus membuat suatu penilaian dalam menentukan saldo aset pajak tangguhan dan pencadangan aset pajak tangguhan,

sedangkan penilaian manajemen dalam menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif (Suranggane, 2007). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anasta (2015), Timuriana & Muhamad (2015), Fitriany (2016), dan Kurnia (2018) menemukan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan Ningsih (2017), Utami et al. (2018), dan Yahya & Wahyuningsih (2019) menyimpulkan bahwa aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya, maka pengujian kembali aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba perlu untuk dilakukan

Sementara itu, Phillips et al. (2003) dan Amanda & Febrianti (2015) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan merupakan beban yang terjadi akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Zain (2007) menjelaskan beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara PPh terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Perbedaan antar laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak (Yulianti, 2005).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tundjung & Haryanto (2015), Negara & Suputra (2017), Kurnia (2018) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan. Sylvia et al. (2016), Amanda & Febrianti (2015), Fitriany (2016), Ningsih (2017), dan Prasetyo et al. (2019) menyimpulkan bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sumbari et al. (2017) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya, pengujian kembali beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba penting untuk dilakukan.

Selanjutnya, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan terhadap kegiatan ekonomi kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Gayatri & Pria, 2016). CSR merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap para pemangku kepentingan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya (Arief & Didik, 2014). Pengungkapan CSR oleh perusahaan di Indonesia adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan operasinya berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pasal 66 ayat 1 menambahkan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan adalah pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Walaupun demikian, item-item tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan masih merupakan informasi yang bersifat sukarela (Putra, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Siregar (2019) dan Wardanti & Santi (2018) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba, Anugra & Siregar (2019) Yahya & Wahyuningsih (2019) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Gil et al. (2016), Putri & Rohman (2016), Ricardo & Faisal (2015), Paramita et al. (2017), dan Gayatri & Pria (2016) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian sebelumnya yang bervariasi mengakibatkan pengujian kembali CSR terhadap manajemen laba penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan jawab sosial perusahaan. Data penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan perusahaan subsektor manufaktur (Tundjung & Haryanto, 2015; Timuriana & Muhamad, 2015; Fitriany, 2016; Sylvia et al., 2016; Sumbari et al., 2017; Negara & Suputra, 2017; Ningsih, 2017; Utami et al., 2018; Kurnia, 2018; Prasetyo et al., 2019), *consumer goods* (Amanda & Febrianti, 2015, Wardani, 2018), telekomunikasi dan konstruksi (Yahya & Wahyuningsih, 2019), dan otomotif (Prasetyo et al., 2019). Sementara itu, penelitian ini menggunakan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan di mana perusahaan sektor ini yang diwajibkan dalam UU No 40 Tahun 2007 melakukan tanggung jawab sosial. Perusahaan tambang dituntut untuk serius dalam melakukan CSR dalam aktivitas operasinya. Penerapan CSR pada perusahaan sektor pertambangan guna memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut yang meliputi konsumen, supplier, karyawan, pemodal, komunitas, dan manajemen bekerja untuk kepentingan bersama (Harrison et al, 2019). Dengan demikian, kegiatan CSR yang sejalan dengan kegiatan operasi perusahaan perlu dituangkan dalam laporan keberlanjutan yang memperlihatkan upaya perusahaan bukan hanya memenuhi kewajiban lingkungannya saja, tetapi juga kewajiban ekonomi dan sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Watts & Zimmermen (1990) membagi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan *earnings management* yaitu *the bonus plan hypothesis*, *the debt covenant hypothesis*, dan *the political cost hypothesis*.

Sejalan dengan hal tersebut, Negara & Suputra (2017) menjelaskan manajemen laba terkait aspek perpajakan dapat dijelaskan oleh hipotesis ketiga dari teori akuntansi positif yaitu *the political cost hypothesis*. Dalam hipotesis tersebut dijelaskan bahwa dalam hal perusahaan berhadapan dengan biaya politik, manajemen perusahaan akan cenderung untuk melakukan manajemen laba untuk meminimalkan biaya politik yang akan ditanggung perusahaan (Negara & Suputra, 2017). Salah satu dari biaya politik tersebut adalah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Scott, 2015).

Terkait dengan kewajiban pajak perusahaan, terdapat aset pajak tangguhan yang merupakan aset yang timbul akibat adanya perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif atas beban pajak sehingga beban pajak komersial lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak sesuai undang-undang perpajakan. Semakin besar perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan perusahaan dengan laba fiskal menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan bagi pengguna laporan keuangan. Selisih positif antara laba komersial dan laba fiskal mengakibatkan terjadinya koreksi positif yang menimbulkan terjadinya aset pajak tangguhan (Zuranggane, 2007). Anasta (2015) menyatakan bahwa aset pajak tangguhan dapat dijadikan sebagai alat bagi manajer untuk melakukan manajemen. Kondisi ini terbukti dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Timuriana & Muhamad (2015), Anasta (2015), Fitriany (2016), dan Kurnia (2018) bahwa aset pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba perusahaan. Aset pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan menunjukkan adanya celah aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh manajer karena manajer cenderung untuk meminimalisasi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁ : aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Silvia et al. (2016) menyatakan bahwa salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan tersebut mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earning threshold*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada dibawah *earning threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Kondisi ini ditunjukkan dengan terlalu sedikitnya perusahaan yang melaporkan laba dibawah *earning threshold*. Sebaliknya, terlalu banyaknya perusahaan yang melaporkan laba diatas *earning threshold*. Manajemen memiliki dorongan yang berbeda dalam melaporkan laba akuntansi dan laba fiskal, sebab laba akuntansi secara implisit atau secara eksplisit digunakan dalam kontrak (misalnya, kompensasi rencana dan persyaratan utang) dan penilaian saham.

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul dikarenakan adanya perbedaan waktu antara laba akuntansi/laba komersial yang disusun sesuai dengan PSAK dengan laba fiskal yang disusun sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sistem perpajakan dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, sedangkan sistem akuntansi dirancang untuk menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dan diharapkan dapat mengatasi asimetris informasi (teori keagenan) yang mungkin terjadi antara manajemen sebagai pihak internal dan pengguna laporan keuangan sebagai pihak eksternal (Febrian et al., 2015). Perbedaan yang timbul antara laba fiskal dan komersial dapat menyediakan informasi tambahan bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kualitas *current earnings* perusahaan (Phillips et al., 2003). Peraturan perpajakan lebih membatasi keleluasaan penggunaan diskresi dalam menghitung penghasilan kena pajak, itulah sebabnya selisih laba komersial dan laba fiskal dapat menginformasikan tentang adanya diskresi manajemen dalam proses akrual (Febrian et al., 2015).

Perbedaan laba fiskal dengan laba akuntansi menunjukkan tingkat diskresi manajemen yang semakin besar. Tingkat diskresi yang dilakukan oleh manajemen akan tercermin dalam beban pajak tangguhan yang merupakan indikator untuk mendeteksi praktik manajemen laba (Phillips et al., 2003). Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, artinya nilai beban pajak tangguhan yang semakin tinggi akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba juga semakin tinggi (Negara & Suputra, 2017). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi. Nilai beban pajak tangguhan yang semakin tinggi akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba juga semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Tundjung & Haryanto (2015), Negara & Suputra (2017), dan Kurnia (2018) bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba perusahaan. Beban pajak tangguhan merupakan area yang digunakan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂ : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

CSR merupakan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sejalan dengan aktivitas operasi perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Penerapan CSR oleh perusahaan tidak hanya berfokus pada profit, namun juga mendukung dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat (Ricardo & Faisal, 2015). Penerapan CSR oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat secara luas karena perusahaan menggunakan sumber-sumber daya yang berada di masyarakat (*stakeholder*). Stakeholder memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-

sumber daya tersebut (Ghozali & Chariri, 2007). Ketika stakeholder mengendalikan sumber daya yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan keinginan stakeholder (Ghozali & Chariri, 2007).

Salewski & Zulch (2014) menemukan bahwa perusahaan di negara-negara maju melaporkan lebih banyak aktivitas CSR untuk menutupi tindakan yang diamati seperti manajemen laba. Namun, Scholtens & Kang (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang berorientasi CSR memiliki pengaruh positif terhadap perlindungan investor. Kondisi ini mendorong penciptaan laporan keuangan yang lebih baik dan meminimalkan adanya diskresi manajer dalam mempengaruhi kebijakan akuntansi tertentu dalam praktek manajemen laba akrual. Penelitian tersebut sejalan dengan Ricardo & Faisal (2015), Putri & Rohman (2016), Gayatri & Prasetya (2016), dan Paramita et al. (2017) yang menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Perusahaan. Perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang tinggi cenderung untuk tidak melakukan manajemen laba karena perusahaan berkeinginan untuk memiliki hubungan yang baik dengan *stakeholdernya*. Perusahaan akan menjaga lingkungan kerjanya dengan baik sehingga proses bisnis perusahaan tidak terganggu baik dari dalam pihak internal perusahaan ataupun pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (web.idx.co.id) dan situs perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Jangka waktu sampel yang dipilih dari tahun 2016 s.d. 2019 karena sejak tahun 2016 s.d. laba perusahaan pertambangan terus mengalami kenaikan dari sebelumnya selalu mengalami penurunan dari periode waktu 2012 s.d. 2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah	Ukuran
1.	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek sebelum tahun 2016	43	Perusahaan
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak termasuk papan utama	(21)	Perusahaan
3.	Perusahaan pertambangan yang laporan keuangan di suatu tahun 2016-2019 tidak tersedia	(2)	Perusahaan
4.	Perusahaan pertambangan yang memperoleh laba negatif di suatu tahun 2016-2019	(4)	Perusahaan
5.	Perusahaan pertambangan yang tidak mempunyai data aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, atau jawab sosial perusahaan di suatu tahun 2016-2019	(1)	Perusahaan
<i>Outlier data</i>		(1)	Perusahaan
Total Sampel		14	Perusahaan
Tahun		4	Tahun
Total Observasi		56	Firm-Year

Sumber: data diolah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Proksi yang digunakan mengikuti Dechow et al. (1995) dengan *discretionary accrual* dari *Modified Jones Model* yang digunakan juga oleh Guay et al. (1996), Bernard & Skinner (1996), dan Philips et al. (2003). Adapun Langkah-langkah dari proksi ini adalah sebagai berikut:

$$EM = DTA$$

$$DTA = TACC - NDA$$

Di mana :

EM : manajemen laba
DTA : *discretionary accruals*
TACC : total akrual
NDA : *nondiscretionary accruals*
Total accrual dihitung dengan proksi:

$$TACC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Di mana:

TACC_{it} : total accruals perusahaan i pada periode t
N_{it} : Laba bersih perusahaan i pada periode t
CFO_{it} : Arus kas operasi perusahaan i pada periode t

Nilai akrual dihitung dari error atau residual dari dengan persamaan regresi linear sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS) persamaan berikut:

$$TACC_{it}/TA_{i(t-1)} = \beta_1 (1/TA_{i(t-1)}) + \beta_2 (\Delta REV_{it} / TA_{i(t-1)}) + \beta_3 (PPE_{it}/TA_{i(t-1)}) + \beta_4 (NI_{it}/TA_{i(t-1)}) + \epsilon_{it}$$

Dimana:

- $TA_{i(t-1)}$: total asset perusahaan i pada periode $t - 1$
 ΔREV_{it} : pendapatan perusahaan i di tahun t dikurangi pendapatan di tahun $t - 1$
 PPE_{it} : nilai aktiva tetap – akumulasi penyusutan pada perusahaan i pada tahun t
 NI_{it} : Net Income perusahaan pada tahun t
 β : Fitted Coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals

Nilai *Non Discretionary Accrual* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_t = \beta_1 (1/TA_{i(t-1)}) + \beta_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}/TA_{i(t-1)}) + \beta_3 (PPE_{it}/TA_{i(t-1)}) + \beta_4 (NI_{it}/TA_{i(t-1)})$$

- NDA_t : *non discretionary accrual* pada tahun t
 $TA_{i(t-1)}$: total asset perusahaan i pada periode $t - 1$
 NI_{it} : Net Income perusahaan pada tahun t
 ΔREC_{it} : perubahan piutang bersih i di tahun t dikurangi piutang bersih di tahun $t-1$

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan jawab sosial perusahaan/CSR. Proksi variabel CSR menggunakan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan kerangka GRI G4 yang menunjukkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan (Pratiwi & Siregar, 2019). Aspek yang perlu diungkapkan menurut kerangka GRI G4 terdapat 91. Oleh karena, data CSR akan menggunakan persentase dari pengungkapan yang dilakukan perusahaan dibagi dengan 91 mengikuti Firmansyah & Irwanto (2020) sebagaimana perhitungan berikut

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

dimana CSR_{ij} merupakan indeks pengungkapan CSR, $\sum X_{ij}$ merupakan jumlah CSR yang diungkapkan, dan n_j merupakan aspek yang perlu diungkapkan berdasarkan GRI 4 yaitu 91.

Perhitungan deferred tax asset (aset pajak tangguhan) penelitian ini mengikuti Zuranggane (2007) yaitu perubahan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t -1 dibagi dengan nilai aset pajak tangguhan pada akhir periode t sebagai berikut:

$$APT_{it} = \frac{\Delta \text{Aset Pajak Tangguhan}_{it}}{\text{Aset Pajak Tangguhan}_{it}}$$

Beban pajak tangguhan diukur dengan proksi yang digunakan oleh Phillips et al. (2003) yaitu membobot beban pajak tangguhan dengan total aktiva atau total asset periode t-1 untuk memperoleh nilai yang terhitung dengan proporsional yaitu:

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}_t}{\text{Total Aset } t-1}$$

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Manajemen yang memiliki utang yang tinggi akan merasakan tekanan dari pihak kreditor untuk memenuhi kewajibannya membayar bunga tiap periode. Leverage dapat diperoleh dengan cara total utang dibagi dengan total ekuitas perusahaan sebagaimana Lazzem & Jilani (2017) yaitu:

$$Lev_{it} = \frac{Debt_{it}}{Equity_{it}}$$

Perusahaan yang berukuran besar memiliki banyak *stakeholder* yang berkepentingan terhadap kinerja mereka. Setiap stakeholder menginginkan timbal balik atas investasi yang telah mereka tanamkan. Ukuran perusahaan dapat diperoleh dengan cara logaritma natural dari total aset perusahaan sebagaimana Ali et al. (2015), yaitu:

$$\text{UkuranPT} = \ln (\text{TotalAset})$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel.

Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$EM_{it} = \alpha + \beta_1 CSR_{it} + \beta_2 ASETPT_{it} + \beta_3 BEBANPT_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan

- EM_{it} = manajemen laba perusahaan i pada tahun t
 CSR_{it} = elemen jawab sosial perusahaan i pada tahun t
 $ASETPT_{it}$ = elemen aset pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t
 $BEBANPT_{it}$ = elemen beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

LEV_{it} = leverage perusahaan i pada tahun t
SIZE_{it} = ukuran perusahaan i pada tahun t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-Rata	Median	Maksimum	Minimum	Std. Dev.
EM	-0.0414	-0.0456	0.3147	-0.2010	0.0852
APT	-0.0067	0.0604	0.9602	-1.1179	0.4266
CSR	0.2452	0.2142	0.7472	0.0549	0.1462
DTE	-0.0007	-0.0005	0.0183	-0.0432	0.0087
LEV	0.8949	0.6348	5.9762	0.0075	0.9594
SIZE	30.054	30.111	32.258	27.913	1.1071

Sumber: data diolah

Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan common effect model yang ditunjukkan dalam Tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Arah	Koefisien	t-Statistik	Prob.
C		0.10334	0.73260	0.23360
APT	+	0.03090	2.49868	0.00790 *
CSR	-	-0.08542	-2.14677	0.01835 **
DTE	+	2.73181	3.22841	0.00110 *
LEV		-0.00417	-0.34389	0.36620
SIZE		-0.00406	-0.80804	0.21145
R ²	0.42760			
Adj. R ²	0.37036			
F-stat.	7.47025			
Prob(F-stat.)	0.00003			

Sumber: data diolah

Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini sejalan dengan Timuriana & Muhamad (2015), Anasta (2015), Fitriany (2016), dan Kurnia (2018). Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus perusahaan tanggung (Scott, 2015). Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Beban pajak komersial yang lebih kecil dari beban pajak menurut Undang-Undang Perpajakan yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan menyebabkan koreksi positif yang menghasilkan Aset Pajak Tangguhan (Negara & Suputra, 2017). Salah satu penyebab terjadinya perbedaan temporer adalah adanya perbedaan aturan mengenai penyusutan antara akuntansi komersial dan perpajakan. Standar Akuntansi yang mengatur terkait penyusutan adalah PSAK 16 (IAI, 2015). PSAK 16 (IAI, 2015). hanya mengatur terkait metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan, berbeda dengan aturan perpajakan yang mengatur terkait tentang metode yang boleh digunakan dan jangka waktu penyusutan masing-masing kelompok aset tetap. Perbedaan ini menyebabkan manajemen mempunyai kebebasan menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Berdasarkan karakteristik perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian, rata-rata nilai aset tetap adalah sebesar 25% dari nilai total aset. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengatur beban penyusutan sehingga bisa mengecilkan pajak yang terutang.

Aset pajak tangguhan yang jumlahnya diperbesar oleh manajemen kemungkinan dimotivasi adanya beban politis atas besarnya usaha perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak agar tidak merugikan perusahaan. Diberlakukannya PSAK 46 (IAI, 2016) mensyaratkan para manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan. Peraturan ini dapat memberikan kebebasan pada para manajer untuk menentukan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian aset pajak tangguhan pada laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan untuk mengindikasikan ada tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan yang dilaporkan.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap manajemen laba

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini sejalan dengan Tundjung & Haryanto (2015), Negara & Suputra (2017), dan Kurnia (2018). Perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung (Scott, 2015). Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul akibat perbedaan antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan dengan yang diperbolehkan menurut pajak.

Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yaitu dengan cara melihat hasil koreksi fiskal berupa koreksi negatif. Koreksi negatif adalah kondisi di mana pendapatan menurut akuntansi fiskal lebih kecil daripada akuntansi komersial dan pengeluaran menurut akuntansi fiskal lebih besar daripada akuntansi komersial. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadi kenaikan kewajiban pajak tangguhan pada pos neraca periode berjalan dan periode berikutnya diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Pengaruh CSR terhadap manajemen laba

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil pengujian ini sejalan dengan Gayatri & Prasetya (2016), Paramita et al. (2017), dan Gil et al. (2016). Hasil mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR tidak melakukan manipulasi manajemen laba melalui kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. CSR merupakan salah satu komponen wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. Sektor pertambangan, berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 diwajibkan untuk melakukan CSR dan diatur kembali mengenai reklamasi pascatambang pada UU 4 tahun 2009 sehingga dalam menjalankan operasinya mereka harus mempertimbangkan peraturan tersebut. Perusahaan pertambangan di Indonesia mulai menuju kegiatan usaha berkelanjutan yang peduli lingkungan dengan semakin ketatnya pengawasan dari pemerintah seperti Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, serta semakin pedulinya masyarakat Indonesia mengenai lingkungan hidup dengan populernya film dokumenter kegiatan pascatambang pada media sosial bisa menjadi salah satu faktor perusahaan pertambangan memilih untuk tidak melakukan manajemen laba.

Perusahaan pertambangan di Indonesia belum ada yang mengungkapkan 91 elemen pengungkapan CSR sesuai dengan GRI G4. Beberapa perusahaan pertambangan sedang berusaha memenuhi GRI G4 dengan membuat sustainability report seperti ANTM, PTBA, dan ITMG dan membuat rangkuman atas pemenuhan index. Rendahnya pengungkapan CSR secara umum berarti perusahaan pertambangan belum fokus dalam melibatkan CSR dalam aktivitas operasinya, sehingga diperlukan peraturan dari pemerintah untuk menyeragamkan pengungkapan CSR agar perusahaan tambang dapat memenuhi pengungkapan berdasarkan standar.

Para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sekitar dan pemegang saham memiliki hubungan yang dekat dan berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan serta saling mempengaruhi sebagaimana *stakeholders theory*. Stakeholder eksternal menginginkan agar perusahaan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan merasa bertanggung jawab terhadap stakeholder eksternal, sehingga melaksanakan peraturan tersebut. Pengawasan yang ketat dari pihak eksternal mengakibatkan perusahaan mengungkapkan CSR dengan lebih jujur. Dampak dari penerapan CSR, perusahaan akan memiliki etika yang lebih tinggi sehingga perusahaan juga akan mengedepankan kepentingan stakeholders (Firmansyah&Triastie, 2020; Firmansyah&Estutik, 2020). Kondisi ini mengakibatkan pilihan-pilihan kebijakan akuntansi dalam melakukan manajemen laba menjadi rendah. Oleh karena itu, penerapan CSR oleh perusahaan dapat menurunkan diskresi manajemen dalam tindakan oportunistik yang tercermin dalam laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan CRS dalam aktivitas operasinya cenderung memiliki kualitas laba yang tinggi, sehingga informasi laba dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

PENUTUP

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa asset pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Manajemen termotivasi untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan melakukan manajemen laba. Selain itu, beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Manajemen termotivasi untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan melakukan manajemen laba. Selanjutnya, jawab sosial perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pihak external memiliki kepentingan terhadap

operasi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan sustainability yang diterapkan oleh perusahaan dalam aktivitas operasinya. Penerapan CSR yang baik mendorong perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penghitungan indeks tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan secara manual sehingga dimungkinkan masih terdapat subjektivitas yang telah dilakukan. Selain itu, tidak semua perusahaan menerbitkan *sustainability report* menyebabkan data terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai standar GRI G4 tidak bisa diperoleh dengan lengkap sehingga melibatkan subjektivitas dalam perhitungan CSR. Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan pertambangan papan utama dengan laba positif dari tahun 2016-2019, sehingga tidak dapat menggeneralisir hasil penelitian ini untuk perusahaan semua sektor atau sektor lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik dengan laba positif ataupun negatif sehingga diharapkan hasilnya lebih akurat atau menggunakan data keuangan perusahaan sektor lainnya.

Penelitian ini menyaran bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pemeriksaan terhadap aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan yang dilaporkan oleh perusahaan tambang di Indonesia karena terdapat indikasi adanya manajemen laba yang mempergunakan kedua akun tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu mewajibkan perusahaan tambang untuk membuat sustainability report sebagaimana standar yang berlaku sehingga informasi terkait dengan CSR dapat diperoleh oleh stakeholder secara mudah, komprehensif dan komparatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, F., & Febrianti, M. (2015). Analisis pengaruh beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan basis akrual terhadap manajemen laba. *Ultima Accounting*, 7(1), 70-86.
- Anasta, L. (2015). Analisa pengaruh deferred tax asset, deferred tax liabilities dan tingkat hutang terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman di Indonesia. *Jurnal Tekun*, 4(2), 250-270.
- Anugra, S. R., & Siregar, S. V. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Strategis Dan Non Strategis Terhadap Manajemen Laba: Peran Perlindungan Investor Pada Industri Perbankan di ASEAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(3), 567-582.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- Djamaluddin, S., Wijayanti, H. T., & Rahmawati (2008). Analisis perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal terhadap persistensi laba, akrual, dan aliran kas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Jakarta. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 11(1), 52-74.
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8-24.
- Firmansyah, A., & Irwanto, A. (2020). Do income smoothing, forward-looking disclosure, and corporate social responsibility decrease information uncertainty? *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7), 9513-9525.
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2020). The role of corporate governance in emerging market: Tax avoidance, corporate social responsibility disclosures, risk disclosures, and investment efficiency. *Journal of Governance and Regulation*, 9(3), 8-26.
- Fitriany, L. C. (2016). Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. *JOM Fekon*, 3(1), 1150-1163.
- Gayatri & Pria, P. (2016). Implikasi Ukuran Perusahaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(4), 1-22.
- Harrison, J. S., Barney, J. B., Freeman, R. E., & Phillips, R. A. (2019). *The Cambridge handbook of stakeholder theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383.
- Febrian, R., Wahyudi, T., & Subeki, A. (2015). Analisis pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang tercatat di bursa efek Indonesia). *AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 145-160.
- Kurnia, R. (2017). *Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, A. D. (2019). <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a5192a6cb8/empat-kondisi-garuda-masukkan-piutang-dari-mahata-ke-pendapatan-2018> diakses tanggal 16 Agustus 2020.
- Negara, A. A., & Suputra, I. D. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 2045-2072.

- Ningsih, F. C. (2018). Pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2016). Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Paramita, N. N., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh financial distress, risiko litigasi dan pengungkapan corporate social responsibility terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016). *E-Journal Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11.
- Phillips, J., Pincus, M., & Rego, S. O. (2003). Earnings mangement: new evidence based on deferred tax expense. *The Accounting Review*, 78(2), 491-521.
- Prasetyo, N. C., Riana, & Masitoh, E. (2019). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. *Modus*, 31(2), 156-171.
- Pratiwi, I. S., & Siregar, S. V. (2019). The Effect of corporate social responsibility on tax avoidance and earnings management: the moderating role of political connections. *International Journal of Business*, 24(3), 230-248.
- Putri, G. V., & Rohman, A. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan profitabilitas terhadap manajemen laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(2), 1-11.
- Ricardo, D. M., & Faisal. (2015). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap praktik manajemen laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-9.
- Salewski, M., & Zulch, H. (2012). *The association between corporate social responsibility and earnings quality evidence from European Blue Chips*. HHL Working Paper Series No. 112.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory 7th edition*. New Jersey: Prentice Hall Canada Inc.
- Sumbari, S., Murni, Y., & Masri, I. (2017). *Analisis beban pajak tangguhan dan akrual dalam mendeteksi manajemen laba*. Konferensi Ilmiah Akuntansi IV Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila.
- Suranggane, Z. (2007). Analisis aktiva pajak tangguhan dan akrual sebagai prediktor manajemen laba: kajian empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. *Journal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77-94.
- Timuriana, T., & Muhamad, R. R. (2015). Pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 1(2), 12-20.
- Tundjung, G. M., & Haryanto. (2015). pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 1-9.
- Utami, J., Manik, T., & Husna, A. (2018). Pengaruh ukuran perusahaan, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan akrual terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2016.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 11-24.
- Watt, R., & Zimmerman, J. (1990). Positive accounting theory: a ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156.
- Yahya, A., & Wahyuningsih, D. (2019). Pengaruh perencanaan dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan telekomunikasi dan konstruksi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013 – 2017. *SOSIOHUMANITAS*, 21(2), 86-92.
- Yulianti. (2005). Kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. *Journal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(1), 107-129.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190424204726-92-389396/membedah-keanehan-laporan-keuangan-garuda-indonesia-2018> diakses tanggal 16 Agustus 2020